

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2019-2023**



**DIAJUKAN OLEH:
NI PUTU EVIANA KARTIKA SARI
NIM. 126231138**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2019-2023



DIAJUKAN OLEH:
NI PUTU EVIANA KARTIKA SARI
NIM. 126231138

LAPORAN AKHIR DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANEGARA
JAKARTA

2024

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2019-2023**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Ni Putu Eviana Kartika Sari

NIM. 126231138

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Yuniarwati, S.E., M.M, Ak, CA, BKP

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2019-2023**

Ni Putu Eviana Kartika Sari NIM. 126231138

ABSTRACT

This research aimed to analyze the contribution of local taxes on the local revenue of Jayapura Regency period 2019-2023. Tax objects in the Jayapura Regency consist of 9 tax objects, i.e. hotel tax, restaurant tax, recreation tax, entertainment tax, street lighting tax, parking tax, groundwater tax, non-metal mineral and land tax, and rural and urban land and building tax. This research uses descriptive quantitative research methods, which analyses target data and actual revenues of local taxes by using ratio analysis of the effectiveness and contribution. The results showed that the level of effectiveness of local tax collection in 2019-2023 tends to fluctuate with average score of effectiveness 57,40% or classified as ineffective. The tax object with the highest effectiveness score is recreation tax (109,37%; very effective) and the lowest is rural and urban land and building tax (32,42%; ineffective). The average level of local tax contribution to local revenue in 2019-2023 is 34,04% with quite good criteria. The tax object with the highest average level contribution is restaurant tax (7,82%; very not good) and the lowest is recreation tax (0,20%; very not good).

Keywords: Local Revenue, Local Taxes, Effectiveness, and Contribution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura periode 2019-2023. Obyek pajak Kabupaten Jayapura terdiri dari 9 obyek pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu menganalisis data target dan realisasi penerimaan pajak daerah dengan menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah pada tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 57,40% atau tergolong kriteria tidak efektif. Obyek pajak daerah dengan skor efektivitas paling tinggi adalah pajak hiburan (109,37%; sangat efektif) dan paling rendah adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (32,42%; tidak efektif). Adapun rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2019-2023 adalah sebesar 34,04% dengan kriteria cukup baik. Objek pajak daerah dengan rata-rata kontribusi paling tinggi adalah pajak restoran (7,82%; sangat kurang baik) dan paling rendah adalah pajak hiburan (0,20%; sangat kurang baik).

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Efektivitas, dan Kontribusi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan FEB Universitas Tarumanegara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanegara.
3. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara.
4. Dr. Jamaludin Iskak, S.E., M.Si., Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara.
5. Yuniarwati, S.E., M.M, Ak, CA, BKP selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanegara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 21 Juni 2024

Ni Putu Eviana Kartika Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Kabupaten Jayapura	4
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4
2.3 Pajak Daerah	5
2.4 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	7
BAB III METODE PENELITIAN.....	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Deskripsi Data Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah.....	11
4.2 Deskripsi Data Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah per Objek	
Pajak Daerah	12
4.2.1 Pajak Hotel	12
4.2.2 Pajak Restoran	14
4.2.3 Pajak Hiburan	15
4.2.4 Pajak Reklame	17
4.2.5 Pajak Penerangan Jalan	18
4.2.6 Pajak Parkir	20
4.2.7 Pajak Air Tanah.....	21
4.2.8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	23
4.2.9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.....	25

4.3 Deskripsi Data Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	26
4.4 Deskripsi Data Analisis Kontribusi Pajak Daerah per Objek Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	28
4.4.1 Pajak Hotel	28
4.4.2 Pajak Restoran	30
4.4.3 Pajak Hiburan	32
4.4.4 Pajak Reklame	33
4.4.5 Pajak Penerangan Jalan	35
4.4.6 Pajak Parkir	37
4.4.7 Pajak Air Tanah	38
4.4.8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	40
4.4.9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	42
4.5 Pembahasan atas Hasil Penghitungan Pajak Daerah	44
4.5.1 Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah	44
4.5.2 Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Peningkatan PAD	46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Simpulan	49
5.2 Saran	50
REFERENSI	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura TA 2019-2023	2
Tabel 3.1 Kriteria dalam Menilai Efektivitas Pajak Daerah	10
Tabel 3.2 Kriteria dalam Menilai Kontribusi Pajak Daerah	10
Tabel 4.1.1 Hasil Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah.....	11
Tabel 4.2.1.1 Hasil Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel	13
Tabel 4.2.2.1 Hasil Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran	14
Tabel 4.2.3.1 Hasil Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan	16
Tabel 4.2.4.1 Hasil Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame	17
Tabel 4.2.5.1 Hasil Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	19
Tabel 4.2.6.1 Hasil Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir	20
Tabel 4.2.7.1 Hasil Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah	22
Tabel 4.2.8.1 Hasil Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Minerba.....	24
Tabel 4.2.9.1 Hasil Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2	25
Tabel 4.3.1 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD.....	27
Tabel 4.4.1.1 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD	29
Tabel 4.4.2.1 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD.....	30
Tabel 4.4.3.1 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD	32
Tabel 4.4.4.1 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD.....	34
Tabel 4.4.5.1 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD ..	35
Tabel 4.4.6.1 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD	37
Tabel 4.4.7.1 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD	39
Tabel 4.4.8.1 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Minerba terhadap PAD.....	40
Tabel 4.4.9.1 Hasil Analisis Kontribusi Pajak PBB-P2 terhadap PAD	42
Tabel 4.5.1.1 Rata-rata Efektivitas Pemungutan Seluruh Objek Pajak Daerah	44
Tabel 4.5.2.1 Rata-rata Kontribusi Objek Pajak Daerah terhadap PAD.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.1 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah	12
Gambar 4.2.1.1 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel	13
Gambar 4.2.2.1 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran	15
Gambar 4.2.3.1 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan	16
Gambar 4.2.4.1 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame	18
Gambar 4.2.5.1 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	19
Gambar 4.2.6.1 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir	21
Gambar 4.2.7.1 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah	22
Gambar 4.2.8.1 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Minerba.....	24
Gambar 4.2.9.1 Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2	26
Gambar 4.3.1 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	27
Gambar 4.4.1.1 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD.....	29
Gambar 4.4.2.1 Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD	31
Gambar 4.4.3.1 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD	33
Gambar 4.4.4.1 Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD	34
Gambar 4.4.5.1 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD.....	36
Gambar 4.4.6.1 Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD.....	38
Gambar 4.4.7.1 Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap PAD.....	39
Gambar 4.4.8.1 Kontribusi Pajak Minerba terhadap PAD	41
Gambar 4.4.9.1 Kontribusi Pajak PBB-P2 terhadap PAD	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak 1 Januari 2021, Indonesia telah memasuki era otonomi daerah yang ditetapkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah dicabut dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembentukan daerah otonom dilakukan dengan tujuan untuk mengimplementasikan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya adalah pajak daerah melalui penguatan restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, dan harmonisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung dan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2011:12).

Adanya peningkatan realisasi penerimaan PAD berpengaruh positif terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan daerah serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat (Payu, 2014). Penelitian ini melakukan studi empiris pada Kabupaten Jayapura yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan dana berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat. Persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata adalah sebesar 9,35% dengan persentase tertinggi sebesar 12,06%. Tingkat kontribusi pendapatan ini masih tergolong sangat jauh dibandingkan persentase kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah dengan rata-rata sebesar 66,38% dengan persentase tertinggi, yaitu sebesar 70,61%. Adapun perbandingan kontribusi PAD dan dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Jayapura selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Perbandingan Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2019-2023

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Dana Perimbangan		Total Pendapatan Daerah
		Jumlah (Rp)	Kontribusi (%)	Jumlah (Rp)	Kontribusi (%)	
1	2019	103.441.918.382,37	7,98	915.331.933.002,00	70,61	1.296.300.298.001,37
2	2020	96.819.236.451,96	6,67	853.622.611.456,00	58,77	1.452.430.199.490,88
3	2021	125.487.074.208,34	10,28	836.268.825.231,00	68,52	1.220.527.573.459,34
4	2022	168.423.810.488,92	12,06	932.899.354.882,00	66,79	1.396.805.981.493,92
5	2023	140.312.585.756,19	9,78	964.416.704.522,00	67,21	1.434.859.752.437,19

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura

Daerah yang mampu mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah maka akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana perimbangan (Payu, 2014). Beberapa penelitian sebelumnya menganalisis kontribusi penerimaan setiap jenis pajak daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah di tahun tersebut. Analisis kontribusi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari realisasi penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di daerah tersebut. Semakin tinggi realisasi pajak daerah, maka semakin besar pula peningkatan pendapatan asli daerah (Payu, 2014). Pernyataan ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Depok, yaitu penerimaan pajak daerah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan PAD (Lieubun, Ngadiman, dan Jap, 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin mengetahui kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Jayapura untuk Tahun Anggaran 2019-2023.

1.2 Tujuan

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Daerah terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura tahun 2018-2023.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Bappenda Kabupaten Jayapura dapat menyediakan informasi mengenai kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Jayapura dalam kurun waktu yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.
2. Hasil dan pembahasan penulisan tugas akhir diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan kepada pihak lain yang berkepentingan.

REFERENSI

- Ahmad Yani. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggoro DD. (2017) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press. Malang: Jawa Timur.
- Amrudin, *et al.* (2022) *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pradina Pustaka. Sukoharjo: Jawa Tengah.
- Lieubun, Ngadiman, dan Jap. (2022). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2015-2018)*. Universitas Tarumanegara. Jakarta: Jawa Barat.
- Keagop, P. (2022, 17 Juni). *Potensi Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Jayapura*. Diakses pada 20 April 2024, dari <https://suaraperempuanpapua.id/potensi-kawasan-ekonomi-khusus-kabupaten-jayapura/#:~:text=Kabupaten%20Jayapura%20memiliki%20potensi%20sumber%20daya,rakyat%20Kabupaten%20Jayapura%20dan%20Papua>.
- Mardiasmo. (2007). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pangestu dan Ngadiman. (2022). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Peningkatan PAD DKI Jakarta Periode 2012-2019*. Universitas Tarumanegara. Jakarta: Jawa Barat.
- Payu. (2014). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo: Gorontalo.
- Pemerintah Indonesia (1979) *Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 2907)*.
- Pemerintah Indonesia (1979) *Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura*.
- Pemerintah Indonesia (1979) *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari Kota Jayapura ke Wilayah Sentani*.
- Pemerintah Indonesia (2017) *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Indonesia (2022) *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Rooy dan Budiarmo. (2015). *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat*. Universitas Sam Ratulangi. Manado: Sulawesi Utara.